

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Pendidikan

1. Definisi Manajemen

Secara etimologis, manajemen bersumber dari berbagai bahasa, dalam bahasa Italia, yakni *meneggiare* yang memiliki makna mengendalikan, adapun dari bahasa Perancis, yakni *management* yang memiliki makna seni melaksanakan dan mengatur, sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *to manage* yang memiliki makna mengelola atau mengatur. Definisi secara etimologis tersebut dapat dimaknai bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan proses.

Menurut George R. Terry, yang mengatakan bahwa suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan lainnya. Selain itu, G. R. Terry juga mendefinisikan dengan indikator masing-masing teorinya :

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan menetapkan cara, strategi perumusan dan sumber daya yang digunakan. Perencanaan harus didasarkan pada beberapa pertimbangan agar realistis mudah mencapai tujuan.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing individu menjadi unit-unit kecil dan

sesuai dengan bidangnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pencapaian tujuan.¹⁹

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Penggerakan adalah upaya melaksanakan, merealisasikan rencana dan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Tujuan penggerakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan mencermati keadaan apabila terjadi penyimpangan. Tujuan pengawasan untuk penyesuaian antara rencana dan hasil akhir dalam suatu kegiatan.²⁰

Hal ini di dukung oleh pendapat James F Stoner bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Luther Gulick manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis untuk memahami alur manusia dalam mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama perihal kemanusiaan.²¹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manajemen ini pada umumnya terdiri atas empat aspek di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian,

¹⁹ Roni Angger, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama (Malang: AE Publishing, 2020) Hlm 1-2.

²⁰ Ibid, Hlm 3

²¹ Paramarta , Kosasih, Denok, *Teori Manajemen*, Edisi Cetakan Pertama (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) Hlm 4-5.

pelaksanaan dan pengawasan. Keseluruhan proses tersebut sangat penting dan saling berkaitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Definisi Manajemen Keuangan Pendidikan

Menurut Iskandar dalam M. Hidayat dan Yuspiani, mendefinisikan manajemen keuangan pendidikan adalah proses tata kelola terhadap fungsi keuangan yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban laporan.²² Adapun menurut Sudana dalam Supriyadi, manajemen keuangan pendidikan adalah salah satu bidang manajemen fungsional dengan menerapkan prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan baik jangka panjang maupun jangka pendek hingga pengelolaan modal keuangan dalam suatu institusi.²³

Menurut Josef, manajemen keuangan adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan pengaturan sumber, penggunaan, serta tanggung jawab atas anggaran dalam lembaga pendidikan. Biaya ini bersifat diperoleh dan dibelanjakan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga guna menunjang efektivitas dan tujuan pendidikan.²⁴

3. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Menurut Indra, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab, memenuhi kewajiban keuangan, menunjukkan kejujuran,

²² Yuspiani M. Hidayat, "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Jurnal Idaarah* Vol.6, No.1 (2020): Hlm 102.

²³ Supriyadi, *Manajemen & Evaluasi Kinerja Organisasi : Implementasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, Cetakan Pertama (Pekalongan, 2023).

²⁴ Josef Papilaya, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Edisi Pertama (Pasaman: CV.Azka Pustaka, 2022) Hlm 51-52.

memberikan hasil guna dan pengendalian.²⁵ Hal ini di dukung oleh pendapat Kadarman, bahwa tujuan mengelola keuangan adalah untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi pemakaian dana, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi laporan keuangan serta untuk mengurangi penyalahgunaan keuangan sekolah.²⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan keuangan adalah memastikan, mengendalikan penggunaan keuangan di sekolah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran di lingkup pendidikan.

4. Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah

Secara teoretis fungsi-fungsi manajemen keuangan pendidikan mengacu pada konsep Thomas, H. Jones (1985) yang di dalamnya terdapat perencanaan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), dan evaluasi (*auditing*). Seorang pimpinan dan pengelola akan melaksanakan fungsi tertentu dalam rangka mengelola tugas secara efektif dan efisien.

a. Perencanaan Anggaran (*Budgeting*)

Jones menjelaskan bahwa *finansial planning is called budgeting* yakni kegiatan untuk mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. Perencanaan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan dalam suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam satuan uang dan dapat dituangkan dalam

²⁵ Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Filosofi, Konsep dan Aplikasi)* (Bandung: Tresna Bhakti Press, t.t.)Hlm 192.

²⁶ Syaifullah MS, "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Scolae: Journal of Pedagogy* Vo.4, No.1 (Tahun 2021): Hlm 12.

barang.²⁷ Anggaran digunakan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran dalam lembaga pendidikan adalah tahapan awal dalam memulai proses, menyusun strategi, kebijakan dan rencana sekolah dengan keuangan yang sangat rinci.²⁸ Dengan hal tersebut perencanaan keuangan di sekolah menjadi hal yang penting dan dikelola sedemikian rupa.

Perencanaan keuangan di sekolah dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) untuk acuan dalam pemasukan dan rencana pengeluaran pembiayaan dalam jangka waktu tertentu.²⁹ Dalam perencanaan anggaran harus mampu mencakup berbagai komponen mulai dari pengadaan kebutuhan pendidikan, biaya operasional sekolah, dan memprioritaskan anggaran dalam kebutuhan yang sangat diperlukan dalam pembelajaran.³⁰ Berdasarkan hal tersebut perencanaan anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan yang terpenting.

b. Pelaksanaan Pembukuan (*Accounting*)

Jones menjelaskan bahwa *implementation involves accounting* yakni pelaksanaan berdasarkan rencana atau kerangka sebelumnya yang di dalamnya terdapat proses pembukuan. Pelaksanaan adalah sebuah proses ataupun tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan

²⁷ Rusdiana, Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah : Konsep, Prinsip Dan Aplikasinya Di Sekolah / Madrasah*, Edisi Revisi Terbaru (Arsad Press, 2021) Hlm 25.

²⁸ Shinta Yuniarti, "Realisasi Anggaran Dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (Rkas) Di Smpit Al-Izzah Kota Serang," *Leadership : Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* Vol.3, No. 2 (2022): Hlm 183-184.

²⁹ Nadia Salsabila, "Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (Rkas) Di Sma Ta'miriyah Surabaya," *Jurnal Jendela Pendidikan* Vol.3, No. 2 (2023): Hlm 242.

³⁰ Anisa, Dina, Rodeo, "Analisis Proses Dan Keterlibatan Pihak Sekolah Dalam Penyusunan Rkas Di Sman 1 Percut Sei Tuan," *Kampus Akademik Publisher Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Vol.3, No. 5 (2025): Hlm 622.

terperinci.³¹ Secara garis besar pelaksanaan keuangan terbagi menjadi dua yakni penerimaan dan pengeluaran anggaran sebagai berikut :

1) Penerimaan Anggaran

Proses penerimaan anggaran dana adalah suatu perolehan dari besarnya dana yang telah diterima oleh suatu lembaga pendidikan.³² Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penerimaan anggaran BPOPP mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan dana BPOPP Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penerimaan anggaran didasarkan pada besaran RAPBD masing-masing daerah sehingga disesuaikan pada lembaga pendidikan di seluruh Provinsi Jawa Timur.³³

Penerimaan anggaran BPOPP menjadi awal proses realisasi rencana kegiatan beserta anggarannya. Dalam penerimaan anggaran BPOPP melibatkan beberapa *stakeholder* terkait seperti Kepala Sekolah, Bendahara dan Petugas Cabang Dinas. Dalam hal intern, Kepala Sekolah bertanggungjawab sepenuhnya atas program kegiatan yang telah disusun dengan anggaran yang terlampir dalam beberapa jangka waktu yang telah ditentukan.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka penerimaan dana didasarkan oleh besaran masing-masing satuan daerah dan hal

³¹ Hinggil, Ruslan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip, Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas)*, Edisi Pertama (Sleman : CV Budi Utama, 2021) Hlm 115.

³² Shinta Yuniarti, "Literatur Review : Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) di SMPIT Al-Izzah Kota Serang," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol.03, No.2 (2022): Hlm 184.

³³ Petunjuk Teknis BPOPP Provinsi Jawa Timur, § Monitoring dan Evaluasi.

³⁴ MM. Sahlan, H. Hidayatulloh, "Manajemen Keuangan Pendidikan di SMA 1 Muhammadiyah," *UMSIDA*, 2021.

tersebut juga menjadi tugas pokok Kepala Sekolah sebagai pimpinan internal dalam lembaga pendidikan. Dalam penerimaan anggaran juga melibatkan beberapa *stakeholder* lainnya.

2) Pengeluaran Anggaran

Pengeluaran anggaran dana adalah besarnya dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.³⁵ Pengeluaran anggaran BPOPP harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di susun dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam pengeluaran anggaran BPOPP penting dilakukan untuk pencatatan atau pembukuan dalam setiap item pengeluaran.³⁶ Hal ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus mewujudkan sistem pengeluaran keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengeluaran anggaran dilakukan sesuai dengan rencana dan disertai pembukuan sebagai bukti pengeluaran anggaran yang transparan. Pengeluaran anggaran yang disertai bukti yang jelas dapat menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

c. Evaluasi (*Auditing*)

Jones menjelaskan bahwa *auditing* adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sudah sesuai

³⁵ Ibid Hlm 185

³⁶ Angger Aristia, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol.13, No.1 (2024): Hlm 4.

dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini *auditing* berkaitan dengan pertanggung jawaban atas penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk dapat dilaporkan pada pihak yang berwenang.³⁷ Pada *auditing* juga merujuk pada evaluasi pembiayaan pendidikan yang merupakan proses untuk mengukur dan melihat dari hasil dari rencana yang dibuat sebelumnya serta merencanakan kembali hal-hal yang belum sempurna.³⁸ Dalam tahap evaluasi juga merujuk pada sinkronisasi anggaran terhadap pengeluaran yang telah dilakukan kemudian disusun menjadi laporan pertanggungjawaban.

5. Prinsip -Prinsip Manajemen Keuangan

Prinsip merupakan pernyataan kebenaran umum yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan tindakan. Prinsip tersebut tertuang dalam Undang - Undang No. 20, Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Menurut Tangkudung dalam Wardija, menyebutkan bahwa prinsip efektivitas juga penting dalam pelaksanaan manajemen keuangan.³⁹

Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan di antaranya :

a. Transparansi

Transparansi merupakan bagian dari pengaturan yang baik dan dibangun atas kebebasan mengakses informasi yang berkaitan dengan

³⁷ Akrim, *Manajemen Pendidikan Dari Basis Teoritik ke Praktis*, Cetakan Pertama (Medan : UMSU Press, 2023) Hlm 115.

³⁸ Ruslan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip, Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas)* Hlm 116.

³⁹ Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah (Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah)* Hlm 12.

kepentingan publik. Selain itu, juga memberikan kemudahan akses untuk informasi baik tentang proses, pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai.⁴⁰ Dengan demikian, transparansi keuangan merupakan bentuk kebebasan untuk penyampaian informasi kepada publik mengenai dana yang dikeluarkan telah sesuai.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan penyampaian informasi kepada publik untuk memungkinkan melihat dan menilai pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang dilakukan.⁴¹ Akuntabilitas bertujuan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan, ataupun penyelewengan penggunaan.⁴² Dengan demikian, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas dana yang telah dialokasikan untuk kebutuhan sekolah.

c. Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan meminimalkan pengeluaran baik sumber daya, waktu, tenaga dan biaya. Menurut Alkurnia, efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan akses, mutu, daya saing

⁴⁰ Elfan Kaukab Ibnu Ngakil, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 (t.t.): 95–96.

⁴¹ Mursalim Yassir dan Asriani, “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan” : *Journal of Management* Volume 5 Issue 2 (2022) (t.t.): Hlm 478.

⁴² Muhammad Din, *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022)Hlm 5.

dan relevansi.⁴³ Dengan demikian, prinsip efisiensi dalam manajemen keuangan merupakan bentuk pengoptimalan segala sumber daya.

d. Efektivitas

Menurut Rusdiana bahwa efektivitas tidak hanya sekedar tercapainya target dengan apa yang telah direncanakan, namun hasil dapat dikorelasikan dengan pencapaian tujuan lembaga pendidikan.⁴⁴ Hal ini didukung oleh pendapat Garner , bahwa efektivitas tidak hanya berhenti pada kesesuaian antara rencana dengan target yang diberikan, namun juga pada pencapaian visi suatu lembaga.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka prinsip-prinsip manajemen keuangan terdiri atas transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

6. Sumber Keuangan Pendidikan

Lembaga pendidikan tidak terlepas dari proses operasional dan tentunya hal tersebut membutuhkan anggaran sebagai sumber daya untuk menggerakkan komponen lainnya. Rofiq dalam Wardija menyebutkan bahwa, terdapat satu sumber daya yang langka yakni uang/pembiayaan.⁴⁶ Lembaga pendidikan tentunya mendapat sumber keuangan sekolah di antaranya dari :

a. Pemerintah Pusat dan Daerah

Semua jenjang dalam lembaga pendidikan baik dari lembaga formal maupun informal, tentunya membutuhkan biaya dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai tujuan pendidikan.

⁴³ Ibid, Hlm 144

⁴⁴ Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah (Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah)* Hlm 15.

⁴⁵ Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Filosofi, Konsep dan Aplikasi)* Hlm 363.

⁴⁶ Ibid, Hlm 3.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.⁴⁷ Adapun sumber dana dari pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan alokasi anggaran pendidikan yang telah diajukan melalui Kementerian.⁴⁸

b. Orang Tua

Pihak sekolah juga menerima biaya dari orang tua / wali murid sebagai kontribusi untuk biaya pendidikan. Dana pembiayaan yang bersumber dari orang tua seperti iuran SPP bulanan, infak, Uang Pangkal, Biaya Ujian Tengah Semester (UTS), Biaya Ujian Akhir Semester (UAS), Biaya ekstrakurikuler, Biaya praktikum, Biaya buku pelajaran, Biaya seragam sekolah, Biaya karyawisata, Biaya sumbangan dan biaya lainnya.⁴⁹

c. Masyarakat

Pihak sekolah juga menerima biaya dari masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sekolah biasanya berupa sumbangan sukarela untuk kegiatan belajar, proyek pembangunan sarana dan prasarana, sumbangan untuk kegiatan sekolah. Segala sumber biaya dari masyarakat dipergunakan untuk mendukung kegiatan di sekolah.⁵⁰

⁴⁷ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan” (T.T.) Hlm 2.

⁴⁸ “Output Anggaran Pendidikan Dalam APBN” (T.T.) Hlm 35.

⁴⁹ Hasibuan, Sudarmono, Anwar, “Pembiayaan Pendidikan,” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 2, Issue 1 (2021): Hlm 274.

⁵⁰ Ibid, Hlm 274

d. Mitra Kerjasama

Lembaga pendidikan swasta lebih menonjolkan program keunggulan yang disediakan dengan berbagai hasil yang kompeten. Pihak sekolah menerima pembiayaan dari mitra kerjasama dengan kontribusi yang diberikan misalnya pada program magang yang meningkatkan kemampuan siswa dan *branding personality* di lembaga pendidikan.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka, sumber keuangan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan pada lembaga pendidikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun sumber keuangan sekolah dari SPP siswa, sumbangan masyarakat dan mitra kerja sama yang saling kertekaitan dalam mendukung operasional proses pendidikan di sekolah.

B. Pengadaan Sarana Kompetensi Keahlian Produksi Film

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pasal VII Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.⁵² Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah lembaga pendidikan harus memenuhi standar sarana prasarana yang bertujuan untuk

⁵¹ Najmy, Istiqomah, "Branding Sekolah Swasta Dalam Menghadapi Kebijakan Zonasi," *Jurnal Idaarah* Vol. Vi, No. 2. Desember 2022 (T.T.): Hlm 282.

⁵² *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Pasal VII, 2023.*

menyediakan fasilitas kepada siswa serta lahan mendapat sertifikasi izin dari pemerintah.

1. Definisi Sarana

Menurut Purwanto dalam bukunya *Administrasi Sarana dan Prasarana*, sarana merupakan peralatan ataupun perabotan yang mendukung proses belajar secara langsung.⁵³ Sedangkan menurut Kartadinata dalam Meylani, sarana merupakan semua fasilitas, perlengkapan dan infrastruktur yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan.

Berdasarkan pertanyaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sarana merupakan fasilitas utama yang digunakan langsung pada saat kegiatan dan cenderung mudah dipindahkan. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas pendukung dan penunjang pada saat kegiatan dan cenderung permanen atau tidak dapat dipindahkan. Keduanya sangat berkontribusi dan berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan

2. Definisi Pengadaan Sarana

Menurut Nandang Sutisna, pengadaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas pokok setiap orang atau organisasi.⁵⁴ Adapun menurut Purwanto dalam bukunya *Administrasi Sarana Prasarana* bahwa

⁵³ ⁵³ Purwanto, *Administrasi Sarana dan Prasarana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UNY Press, 2019) Hlm 28.

⁵⁴ Nandang Sutisna, *Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa*, Cetakan Pertama (CV Adanu Abimata, 2024) Hlm 8.

pengadaan merupakan suatu tindakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan berdasarkan peraturan yang berlaku.⁵⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan merupakan proses untuk mewujudkan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada untuk memenuhi suatu kebutuhan lembaga.

3. Prosedur Pengadaan Sarana Pendidikan

Dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2007. Menurut Martin dalam Miftahul, umumnya pengadaan sarana melalui beberapa tahapan seperti (1) Menganalisis kebutuhan sarana prasarana, (2) Mengklasifikasikan sarana prasarana yang dibutuhkan, (3) Membuat proposal pengadaan sarana prasarana yang ditujukan kepada pemerintah, (4) Peninjauan persetujuan dari pihak yang ditinjau, (5) Tindak lanjut dari proposal pengajuan persetujuan dana yang akan dikirim ke rekening sekolah. Proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan berbeda-beda dan tergantung dari jenis barang yang akan dilakukan pengadaan.⁵⁶

Dalam pengadaan sarana juga dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, hibah, ataupun kerja sama dengan pihak dan mitra kerja. Dalam proses pengadaan sarana prasarana, kepala sekolah harus memastikan kualitas yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang

⁵⁵ Purwanto, *Administrasi Sarana dan Prasarana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UNY Press, 2019) Hlm 66.

⁵⁶ Miftahul Ulum, *Manajemen Pendidikan Kontemporer* (Pohon Tua Pustaka, t.t. 143).

dibutuhkan. Selain itu, setiap pengadaan barang harus dilengkapi dengan bukti pembayaran yang nantinya akan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.⁵⁷ Dengan pengadaan sarana yang terstruktur, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

⁵⁷ Juni Mahanis, Putri, Fadhilla,dkk, *Manajemen Madrasah dan Sekolah (Strategi, Inovasi dan Transformasi Pendidikan)*, Cetakan Pertama (FENIKS Muda Sejahtera, 2025, Hlm 132).